

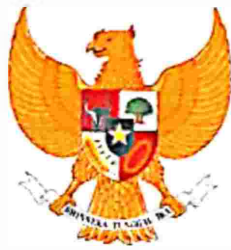


**KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 430 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**NOMOR : 08/RENJA-DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA/2022**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 430 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

WALIKOTALHOKSEUMAWE,

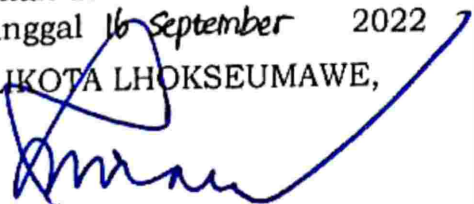
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan Daftar Nomor Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 16 September 2022  
Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



IMRAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 430 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
 DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR NOMOR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023

NO	NOMORRENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4
1	01/RENJA-MPD/2022	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
2	02/RENJA-PK/2022	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	03/RENJA-DINKES/2022	Dinas Kesehatan	
4	04/RENJA-PUPR/2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
5	05/RENJA-BPBD/2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	06/RENJA-SATPOL PPWH/2022	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
7	07/RENJA-DINSOS/2022	Dinas Sosial	
8	08/RENJA-DP3AP2KB/2022	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
9	09/RENJA-DISTANAH/2022	Dinas Pertanahan	
10	10/RENJA-DLH/2022	Dinas Lingkungan Hidup	
11	11/RENJA-DISDUKCAPIL/2022	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	12/RENJA-DPMG/2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
13	13/RENJA-DISHUB/2022	Dinas Perhubungan	
14	14/RENJA-DISKOMINFO/2022	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
15	15/RENJA-DPMPTSP NAKER/2022	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
16	16/RENJA-DISPORAPAR/2022	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
17	17/RENJA-MAA/2022	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
18	18/RENJA-DISPUSIP/2022	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
19	19/RENJA-DKPPP/2022	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
20	20/RENJA-DISPERINDAGKOP/2022	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	

NO	NOMORRENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4
21	21/RENJA-SETDAKO/2022	Sekretariat Daerah	
22	22/RENJA-SETWAN/2022	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	
23	23/RENJA-BAPPEDA/2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
24	24/RENJA-BPKD/2022	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
25	25/RENJA-BKPSDM/2022	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
26	26/RENJA-INSPEKTORAT/2022	Inspektorat	
27	27/RENJA-BANDA SAKTI/2022	Kecamatan Banda Sakti	
28	28/RENJA-BLANG MANGAT/2022	Kecamatan Blang Mangat	
29	29/RENJA-MUARA SATU/2022	Kecamatan Muara Satu	
30	30/RENJA-MUARA DUA/2022	Kecamatan Muara Dua	
31	31/RENJA-KESBANGPOL/2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
32	32/RENJA-MPU/2022	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
33	33/RENJA-BAITUL MAL/2022	Sekretariat Baitul Mal	
34	34/RENJA-DSIPD/2022	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya disertai kerjasama dari pejabat yang berwenang telah tersusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023. Tata cara Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini disusun didasari ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe.

Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga dapat memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Kota Lhokseumawe.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu mengingat dimasa yang datang perubahan-perubahan terus terjadi,

maka Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan yang konstruktif sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini dapat terlaksana dan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kota Lhokseumawe.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terimakasih.

Lhokseumawe, 15 Agustus 2022  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Lhokseumawe



**Dra. MARIANA AFFAN, MM**  
Penyelia Utama Muda  
Nip. 19630612 199003 2 002

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang. ....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan. ....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan. ....	I-5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. ....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II-22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK .....	II-23
2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat.....	II-43
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB KOTA LHOKSEUMAWE .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB .....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BABA V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pelaksana pemerintah daerah. Renja Perangkat Daerah juga berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMK serta Tata Cara Perubahan RPJPK, RPJMK dan RKPK. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan SKPK untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan awal RKPK. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota DPRK Lhokseumawe.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPK dan Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan seperti Renstra, RKPK dan RPJMK. Maka, dalam proses penyusunannya Renja Perangkat Daerah dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Disamping itu, Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kota serta dasar dalam mengusulkan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Propinsi dan APBN.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul dalam satu tahun anggaran.

## **I.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
26. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe;
28. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023.

### **I.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah dan menjadi alat ukur

penilaian kinerja DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja DP3AP2KB adalah:

1. Sebagai rumusan program dan kegiatan pembangunan DP3AP2KB Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2023.
2. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan turunan dari RKPK Lhokseumawe Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja DP3AP2KB Kota Lhokseumawe Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja SKPK dengan dokumen RKPK, Renstra SKPK, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya terhadap proses penyusunan RAPBK.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPK.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi Renja SKPK.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau 2022), mengacu pada APBK tahun berjalan (2022) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPK berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya (Format Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017).

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPK berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKK. Selanjutnya indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Format Tabel T-C.30 Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017).

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPK dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPK, kemudian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPK. Selanjutnya, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), kemudian tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPK

dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK**

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPK dengan hasil analisis kebutuhan (Format tabel T-C.31 Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017).

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan uraian atas hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPK lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPK dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (Format tabel T-C.32 Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017).

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan, garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penambahan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPK.

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisikan uraian tentang Rencana kerja dana pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

## **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021, DP3AP2KB Kota Lhokseumawe telah melaksanakan 9 program, 20 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 5.757.492.627,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.5.496.152.159,- sehingga persentase realisasi anggaran DP3AP2KB Kota Lhokseumawe Tahun 2021 adalah sebesar 95,46% yang termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dapat diuraikan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya dengan kategori sebagai berikut:

A. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan yaitu:

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- yang terealisasi dengan output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah target sasaran 2 dokumen terealisasi sebanyak Rp. 1.122.300,- atau 93,53%.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.361.971.225,- terealisasi sebesar Rp.

2.267.268.057,- atau 95.99% dengan output periode penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target sasaran 12 Bulan.

**- Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran Rp. 25.180020,- terealisasi sebesar Rp. 25.097.900,- atau 99.67% dengan output jumlah jenis alat tulis kantor, peralatan listrik dan bahan kebersihan OPD target sasaran 50 Jenis.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran Rp. 9.641. 172,- terealisasi sebesar Rp. 9.640.000,- atau 99,99% dengan output jumlah makanan dan minuman yang disediakan target sasaran 375 Porsi.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan rencana anggaran Rp. 14.685.770,- terealisasi sebesar Rp. 14.649.500,- atau 99,75 dengan output jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan target sasaran 25 jenis.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan rencana anggaran Rp. 1.140.000,- terealisasi sebesar Rp.1.140.000,- atau 100% dengan output jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan target sasaran 365 exsampler.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD rencana anggaran Rp. 87.000.000,- terealisasi sebesar Rp.86.969.067,- atau 99,96 dengan output frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah target sasaran 50 Kali.

**- Pengadaan Barng Milik Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya, dari rencana anggaran Rp. 6.021.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 99,65% dengan output jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor target sasaran 10 Unit.

**- Penyediaan Jassa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran Rp. 1.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau 100% dengan output jumlah surat yang dikirim target sasaran 100 surat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari rencana anggaran Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.200.768,- atau 70,40% dengan output jumlah rekening yang dibayar target sasaran 36 Rekening Bulan.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran Rp. 30.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.965.000,- atau 99,75% dengan output jumlah jasa pindah kantor target sasaran 1 Kegiatan.
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran Rp. 284.507.200,- terealisasi sebesar Rp. 273.766.840,- atau 96,22% dengan output jumlah pejabat pengelolaan keuangan OPD target sasaran 612 Orang Bulan.

**- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari anggaran Rp. 33.129.200,- terealisasi sebesar Rp. 33.052.000,- atau 99,77% dengan output Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

target sasaran 12 Unit Bulan terealisasi 12 Unit Bulan atau 100%.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari anggaran Rp. 78.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 72.643.500,- atau 92,37% dengan output Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional target sasaran 48 Unit Bulan terealisasi 48 Unit Bulan atau 100%.
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari anggaran Rp. 23.808.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.800.000,- atau 99,97% dengan output Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target sasaran 3 Jenis terealisasi 3 Jenis atau 100%.
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya, dari anggaran Rp. 9.927.100,- terealisasi sebesar Rp. 8.420.000,- atau 84,82% dengan output Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya target sasaran 10 Jenis.
- b. Program Pegasusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :**
    1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp. 80.345.360,- terealisasi sebesar Rp. 79.596.900,- atau 99,07% dengan output jumlah pelaksanaan DWP dan Perwari Kota

Lhokseumawe sesuai dengan target 2 Kegiatan atau 100%.

c. Program Perlindungan Perempuan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

**- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.342.900,- atau 91,70% dengan output jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 50 kasus.

d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

**- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 486.866.948,- atau 97,37% dengan output jumlah perempuan yang memiliki usaha sebanyak 60 orang.

e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

**- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kab/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :**

1. Penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp. 19.716.880,-

terrealisasi sebesar Rp. 19.659.800,- atau 99,71% dengan output jumlah forum data SIGA sebanyak 33 OPD.

f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

**- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp. 31.863.080,- terrealisasi sebesar Rp. 30.418.600,- atau 95,47% dengan output jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi KLA sebanyak 33 OPD.

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 80.650.000,- terrealisasi sebesar Rp. 79.750.000,- atau 98,88% dengan output jumlah Sarana Ruang Bermain Anak sebanyak 1 Unit.

2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota, dengan rencana anggaran Rp. 23.738.420,- yang terrealisasi Rp. 23.716.800,- atau 99,91% dengan output jumlah anak yang mengikuti Kegiatan Hari Anak Nasional dan Forum Anak Daerah sebanyak 140 Orang

g. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

- **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :**
    1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 16.504.590,- terealisasi sebesar Rp. 15.879.000,- atau 96,21% dengan output jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 40 Kasus.
  - **Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :**
    2. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota, dengan rencana anggaran Rp. 43.000.000,- yang terealisasi Rp. 39.381.600,- atau 91,59% dengan output jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak di tingkat Gampong sebanyak 40 Kasus
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 4 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu :
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
    1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal, dengan rencana anggaran Rp. 126.445.000,- yang terealisasi Rp. 124.958.700,- atau 98,82 dengan output Jumlah Media KIE sebanyak 5 KIE.
    2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, dengan rencana anggaran Rp. 300.048.000,- yang

terrealisasi Rp. 267.325.524,- atau 89,09% dengan output Jumlah Balai Penyuluhan KB sebanyak 4 Balai.

- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan rencana anggaran Rp. 326.400.000,- yang terealisasi Rp. 325.530.400,- dengan output jumlah PPKBD dan Sub PPKBD sebanyak 272 Orang.

- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Pemberdayaan

3. Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan rencana anggaran Rp. 40.715.000,- yang terealisasi Rp. 39.792.500,- atau 97,73% dengan output Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaring Pelayanan KB sebanyak 19 Faskes.

4. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan rencana anggaran Rp. 220.981.000,- yang terealisasi Rp. 157.120.000 atau 71,10% dengan output Jumlah Pasangan Keluarga Lestari sebanyak 4 Pasangan.

5. Penyedia Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan rencana anggaran Rp. 625.811.000,- yang terealisasi Rp. 618.623.655,- atau 98,85% dengan output Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB sebanyak 1 Paket.

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber KB terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :



1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, dengan rencana anggaran Rp. 208.864.000,- yang terealisasi Rp. 206.240.000,- atau 98,74% dengan output Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas sebanyak 5 Gampong.
- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
    1. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKr, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /PPKS) dengan rencana anggaran Rp. 62.319.610 yang terealisasi Rp. 62.013.900,- atau 99,51% dengan output Jumlah Kelompok Tribina dan UPPKS yang mendapat pembinaan sebanyak 10 Kelompok.
- C. Faktor pendukung tercapainya kinerja program/kegiatan DP3AP2KB Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 adalah karena penyusunan rencana anggaran, sumber daya aparatur yang ada di DP3AP2KB sangat mendukung pelaksanaan program/kegiatan tersebut.
- E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DP3AP2KB.
- Dengan terlaksananya program/kegiatan DP3AP2KB Tahun 2021 telah mendukung pencapaian kinerja DP3AP2KB seperti :
- Pemberdayaan Kelompok Perempuan
 

Untuk mengimplementasikan program, kegiatan pemberdayaan perempuan pada tahun 2021 DP3AP2KB Kota Lhokseumawe menargetkan 25% perempuan yang berstatus sebagai UMKM untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui Industri Rumahan

yang dialokasikan pada dana otsus tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Yang dilaksanakan melalui pelatihan kerupuk Opak yang diikuti oleh 50 Orang Perempuan.

- Terlaksananya program/kegiatan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak : (1) Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Lhokseumawe berjumlah 56 kasus. Semua kasus yang masuk ditindaklanjuti dengan penanganan yang tepat oleh para konselor yang bertugas pada P2TP2A Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan pihak terkait. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dijamin dalam konstitusi, yakni UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Kekerasan pada anak sampai saat ini masih terjadi, banyak anak yang menjadi korban kekerasan (secara fisik, emosional, verbal, dan seksual), penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, baik yang berlangsung secara disadari maupun yang tanpa disadari. Dalam arti, kekerasan yang memang dilakukan karena kehilangan kendali atas emosi pelaku.

Upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Lhokseumawe adalah dengan sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak dan tentang KDRT bagi seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe melalui pemasangan baliho, spanduk, media massa dan elektronik (radio). Dengan sosialisasi diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas mengenai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan perempuan anak dari tindak kekerasan.

Semua kasus yang masuk sebanyak 56 kasus pada tahun 2021 mendapatkan penanganan oleh unit pelayanan terpadu sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun kasus kekerasan yang diterima adalah sebagai berikut :

1. KDRT/Hak asuh anak/perkosaan sebanyak 33 kasus;
  2. Kekerasan terhadap anak/perkosaan/pelecehan seksual sebanyak 23 kasus.
- Terlaksananya program/kegiatan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : dengan pencapaian peserta KB aktif tahun 2021 sebesar 80%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan pencapaian Renstra DP3AP2KB Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA LHOEKSEUMAWE**  
**SEMESTER II TAHUN 2021**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=<	K	Rp	K	Rp				
											K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
	2		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			15,577,871,570																					
	2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			10,234,855,570																					
	2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	6,882,855,570		100	3,018,090,687	50	1,500,177,564	50	1,389,757,368	100	2,889,934,932	100.0%	95.8%		100	2,889,934,932	100.0%	42.0%	DP3APP&KB			
	2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	15,000,000		2	1,200,000	-	-	2	1,122,300	2	1,122,300	100.0%	93.5%		2	1,122,300	100.0%	7.5%	DP3APP&KB		
	2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	20	15,000,000		10	1,200,000	-	-	10	1,122,300	10	1,122,300	100.0%	93.5%		10	1,122,300	50.0%	7.5%	DP3APP&KB	
	2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	4,909,655,570		12	2,361,971,225	0	1,248,160,771	12	1,019,107,286	12	2,267,268,057	100.0%	96.0%		12	2,267,268,057	100.0%	46.2%	DP3APP&KB		
	2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	784	4,909,655,570		392	2,361,971,225	196	1,248,160,771	196	1,019,107,286	392	2,267,268,057	100.0%	96.0%		392	2,267,268,057	50.0%	46.2%	DP3APP&KB	
	2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	652,500,000		12	137,646,962	6	67,579,200	6	69,917,267	12	137,496,467	100.0%	99.9%		12	137,496,467	100.0%	21.1%	DP3APP&KB		
	2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	100	130,000,000		50	25,180,020	10	11,961,700	20	13,136,200	30	25,097,900	60.0%	99.7%		30	25,097,900	30.0%	19.3%	DP3APP&KB	
	2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Porsi	750	32,000,000		375	9,641,172	187	2,800,000	187	6,840,000	374	9,640,000	99.7%	100.0%		374	9,640,000	49.9%	30.1%	DP3APP&KB	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp		
														K	Rp	K	Rp											
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
		2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	50	37,000,000		25	14,685,770	15	9,762,100	10	4,887,400	25	14,649,500	100.0%	99.8%		25	14,649,500	50.0%	39.6%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Exsampler	730	3,500,000		365	1,140,000	182	285,000	182	855,000	364	1,140,000	99.7%	100.0%		364	1,140,000	49.9%	32.6%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	100	450,000,000		50	87,000,000	10	42,770,400	10	44,198,667	20	86,969,067	40.0%	100.0%		20	86,969,067	20.0%	19.3%	DP3APP&KB	
	Meningkatkan Pelayanan Publik	2	08	01	2.07		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Unit</b>	10	<b>88,000,000</b>		10	<b>6,021,000</b>	-	-	2	<b>6,000,000</b>	2	<b>6,000,000</b>	20.0%	<b>99.7%</b>		2	6,000,000	20.0%	6.8%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.07	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis	10	88,000,000		10	<b>6,021,000</b>	-	-	2	6,000,000	2	6,000,000	20.0%	99.7%		2	6,000,000	20.0%	6.8%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Bulan</b>	12	<b>978,700,000</b>		12	<b>365,747,200</b>	6	<b>143,681,093</b>	6	<b>196,451,515</b>	12	<b>340,132,608</b>	100.0%	<b>93.0%</b>		12	340,132,608	100.0%	34.8%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Surat	200	5,500,000		100	1,200,000	50	800,000	50	400,000	100	1,200,000	100.0%	100.0%		100	1,200,000	50.0%	21.8%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.08	02	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rekening Bulan	36	126,200,000		36	50,000,000	18	15,768,893	18	19,431,875	36	35,200,768	100.0%	70.4%		36	35,200,768	100.0%	27.9%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis	2	65,000,000		2	30,040,000	-	-	2	29,965,000	2	29,965,000	100.0%	99.8%		2	29,965,000	100.0%	46.1%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Orang Bulan	1224	782,000,000		612	284,507,200	306	127,112,200	306	146,654,640	612	273,766,840	100.0%	96.2%		612	273,766,840	50.0%	35.0%	DP3APP&KB	
		2	08	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Bulan</b>	12	<b>239,000,000</b>		12	<b>145,504,300</b>		<b>40,756,500</b>		<b>97,159,000</b>	-	<b>137,915,500</b>	0.0%	<b>94.8%</b>		-	137,915,500	0.0%	57.7%	DP3APP&KB	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp			K	Rp
														K	Rp	K	Rp													
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16		
		2	08	01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Bulan	12	57,000,000			12	33,129,200	6	13,027,000	6	20,025,000	12	33,052,000	100.0%	99.8%		12	33,052,000	100.0%	58.0%	DP3APP&KB		
		2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit Bulan	48	130,000,000			48	78,640,000	24	25,929,500	24	46,714,000	48	72,643,500	100.0%	92.4%		48	72,643,500	100.0%	55.9%	DP3APP&KB		
		2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis	6	17,000,000			3	23,808,000	-	-	3	23,800,000	3	23,800,000	100.0%	100.0%		3	23,800,000	50.0%	140.0%	DP3APP&KB		
		2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	20	35,000,000			10	9,927,100	5	1,800,000	5	6,620,000	10	8,420,000	100.0%	84.8%		10	8,420,000	50.0%	24.1%	DP3APP&KB		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																		<b>88.9%</b>	<b>93.1%</b>				<b>66.7%</b>	<b>51.8%</b>	<b>DP3APP&amp;KB</b>					
<b>Predikat Kinerja</b>																		T	ST				S	R	<b>DP3APP&amp;KB</b>					
		2	08	02			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persen	75.3	380,000,000			75.3	80,345,360	30	-	45	79,596,900	75	79,596,900	99.6%	99.1%		75	79,596,900	99.6%	20.9%	DP3APP&KB		
	Meningkatkan Pelayanan Publik	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keg	3	380,000,000			3	80,345,360	-	-	3	79,596,900	3	79,596,900	100.0%	99.1%		3	79,596,900	100.0%	20.9%			
		2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keg	3	380,000,000			3	80,345,360	-	-	3	79,596,900	3	79,596,900	100.0%	99.1%		3	79,596,900	100.0%	20.9%	DP3APP&KB	P	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																		<b>100.0%</b>	<b>99.1%</b>				<b>83.3%</b>	<b>49.1%</b>	<b>DP3APP&amp;KB</b>					
<b>Predikat Kinerja</b>																		ST	ST				T	SR	<b>DP3APP&amp;KB</b>					
		2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persen	80	310,000,000			80	32,000,000	40	4,741,600	40	24,601,300	80	29,342,900	100.0%	91.7%		80	29,342,900	100.0%	9.5%	DP3APP&KB		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K			Rp
														K	Rp	K	Rp													
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10			12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16	
	Meningkatkan Pelayanan Publik	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	50	310,000,000			50	32,000,000	10	4,741,600	30	24,601,300	40	29,342,900	80.0%	91.7%		40	29,342,900	80.0%	9.5%				
		2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasus	100	310,000,000			50	32,000,000	10	4,741,600	30	24,601,300	40	29,342,900	80.0%	91.7%		40	29,342,900	40.0%	9.5%			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																			<b>80.0%</b>	<b>91.7%</b>				<b>86.1%</b>	<b>20.0%</b>	<b>DP3APP&amp;KB</b>				
<b>Predikat Kinerja</b>																			T	ST				T	SR	<b>DP3APP&amp;KB</b>				
	Meningkatkan Pelayanan Publik	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persen	23	1,000,000,000			23	500,000,000	-	4,711,000	23	482,155,948	23	486,866,948	100.0%	97.4%		23	486,866,948	100.0%	48.7%	<b>DP3APP&amp;KB</b>			
		2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	60	1,000,000,000			60	500,000,000	-	4,711,000	60	482,155,948	60	486,866,948	100.0%	97.4%		60	486,866,948	100.0%	48.7%				
		2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	1,000,000,000			60	500,000,000	-	4,711,000	60	482,155,948	60	486,866,948	100.0%	97.4%		60	486,866,948	50.0%	48.7%	DP3APP&KB	K	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																			<b>100.0%</b>	<b>97.4%</b>				<b>50.0%</b>	<b>48.7%</b>	<b>DP3APP&amp;KB</b>				
<b>Predikat Kinerja</b>																			ST	ST				SR	SR	<b>DP3APP&amp;KB</b>				
	Meningkatkan Pelayanan Publik	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persen	100	277,000,000			100	19,716,880	0	-	100	19,659,800	100	19,659,800	100.0%	99.7%		100	19,659,800	100.0%	7.1%				
		2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OPD	33	277,000,000			33	19,716,880	0	-	10	19,659,800	10	19,659,800	30.3%	99.7%		10	19,659,800	30.3%	7.1%				

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp			K	Rp
														K	Rp	K	Rp													
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16		
			2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD	33	277,000,000			33	19,716,880	0	-	10	19,659,800	10	19,659,800	30.3%	99.7%		10	19,659,800	30.3%	7.1%		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																		<b>30.3%</b>	<b>99.7%</b>				<b>30.3%</b>	<b>7.1%</b>	<b>DP3APP&amp;KB</b>					
<b>Predikat Kinerja</b>																		SR	ST				SR	SR	<b>DP3APP&amp;KB</b>					
		2	08	06				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		85	830,000,000			85	136,251,500	40	-	45	133,885,400	85	133,885,400	100.0%	98.3%		85	133,885,400	100.0%	16.1%		<b>DP3APP&amp;KB</b>
		2	08	06	2.01			<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Anak	120	120,000,000			120	31,863,080	-	-	33	30,418,600	33	30,418,600	27.5%	95.5%		33	30,418,600	27.5%	25.3%		
		2	08	06	2.01	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD	33	120,000,000			33	31,863,080	-	-	33	30,418,600	33	30,418,600	100.0%	95.5%		33	30,418,600	100.0%	25.3%		
	<b>Meningkatkan Pelayanan Publik</b>	2	08	06	2.02			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Paket	1	710,000,000			1	104,388,420	-	-	1	103,466,800	1	103,466,800	100.0%	99.1%		1	103,466,800	100.0%	14.6%		
		2	08	06	2.02	01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket	1	380,000,000			1	80,650,000	-	-	1	79,750,000	1	79,750,000	100.0%	98.9%		1	79,750,000	100.0%	21.0%		
		2	08	06	2.02	03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak	280	330,000,000			140	23,738,420	-	-	80	23,716,800	80	23,716,800	57.1%	99.9%		80	23,716,800	28.6%	7.2%		



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp			
											K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	57.1%	99.9%				28.6%	7.2%	DP3APP&KB		
Predikat Kinerja																	R	ST				SR	SR	DP3APP&KB		
	2	08	07		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS HAK</b>	Persen	100	555,000,000		100	59,504,590	50	4,511,300	50	50,749,300	100	55,260,600	100.0%	92.9%		100	55,260,600	100.0%	10.0%	DP3APP&KB	
	2	08	07	2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kasus	80	275,000,000		40	16,504,590	10	-	30	15,879,000	40	15,879,000	100.0%	96.2%		40	15,879,000	50.0%	5.8%	DP3APP&KB	K
	2	08	07	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasus	80	275,000,000		40	16,504,590	10	-	30	15,879,000	40	15,879,000	100.0%	96.2%		40	15,879,000	50.0%	5.8%	DP3APP&KB	K
	2	08	07	2.02	<b>Penyediaan layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota</b>	Kasus	40	280,000,000		40	43,000,000		4,511,300		34,870,300.00	-	39,381,600	0.0%	91.6%		-	39,381,600	0.0%	14.1%		
	2	08	07	2.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	Kali	60	280,000,000		30	43,000,000	15	4,511,300	15	34,870,300	30	39,381,600	100.0%	91.6%		30	39,381,600	50.0%	14.1%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75.0%	93.9%				37.5%	9.9%	DP3APP&KB		
Predikat Kinerja																	S	ST				SR	SR	DP3APP&KB		
	2	14			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			5,343,016,000																		
	2	14	03		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Anak	2	5,227,194,300		2	1,849,264,000	1.00	412,188,251	1	1,327,402,528	2	1,739,590,779	100.0%	94.1%		2	1,739,590,779	100.0%	33.3%	DP3APP&KB	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp			
														K	Rp	K	Rp												K
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10			12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16
		2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kelompok	2	1,164,637,800			2	426,493,000		150,289,196		241,995,028	-	392,284,224	0.0%	92.0%	-	392,284,224	0.0%	33.7%	DP3APP&KB	K		
		2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	KIE	5	255,184,000			5	126,445,000	2	73,554,800	3	51,403,900	5	124,958,700	100.0%	98.8%	5	124,958,700	100.0%	49.0%			
		2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Balai	4	909,453,800			4	300,048,000	2	76,734,396	2	190,591,128	4	267,325,524	100.0%	89.1%	4	267,325,524	100.0%	29.4%			
		2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Bulan	12	836,400,000			12	326,400,000	6	185,504,000	6	140,026,400	12	325,530,400	100.0%	99.7%	12	325,530,400	100.0%	38.9%			
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	272	836,400,000			272	326,400,000	136	185,504,000	136	140,026,400	272	325,530,400	100.0%	99.7%	272	325,530,400	100.0%	38.9%			
		2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Faskes	19	2,318,129,500			19	887,507,000	-	76,395,055	19	739,141,100	19	815,536,155	100.0%	91.9%	19	815,536,155	100.0%	35.2%			
		2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	19	146,247,000			19	40,715,000	-	15,935,000	19	23,857,500	19	39,792,500	100.0%	97.7%	<	19	39,792,500	100.0%	27.2%	DP3APP&KB	K
		2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Passangan	4	98,000,000			4	220,981,000	2	55,961,400	2	101,158,600	4	157,120,000	100.0%	71.1%	4	157,120,000	100.0%	160.3%	DP3APP&KB	K	
		2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Paket	1	2,073,882,500			1	625,811,000	-	4,498,655	1	614,125,000	1	618,623,655	100.0%	98.9%	1	618,623,655	100.0%	29.8%	DP3APP&KB	P	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2			K	Rp	K	Rp	Realisasi >=/<	K	Rp			K	Rp	
														K	Rp	K	Rp													
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16		
			2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Bulan	12	908,027,000			12	208,864,000	-	-	12	206,240,000	12	206,240,000	100.0%	98.7%		12	206,240,000	100.0%	22.7%	DP3APP&KB	K	
			2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung	10	908,027,000			5	208,864,000	-	-	5	206,240,000	5	206,240,000	100.0%	98.7%		5	206,240,000	50.0%	22.7%	DP3APP&KB	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																			90.9%	94.2%				86.4%	44.4%	DP3APP&KB				
Predikat Kinerja																			ST	ST				T	SR	DP3APP&KB				
			2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persen	81.94	115,821,700			81.94	62,319,610	0	27,063,900	81.94	34,950,000	82	62,013,900	100.0%	99.5%		82	62,013,900	100.0%	53.5%	DP3APP&KB		
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok	85	115,821,700			85	62,319,610	-	27,063,900	85	34,950,000	85	62,013,900	100.0%	99.5%		85	62,013,900	100.0%	53.5%	DP3APP&KB	K	
			2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	20	115,821,700			10	62,319,610	5	27,063,900	5	34,950,000	10	62,013,900	100.0%	99.5%		10	62,013,900	50.0%	53.5%	DP3APP&KB	K
Rata-rata capaian kinerja (%)																			99.1%	95.0%				88.6%	50.3%	DP3APP&KB				
Predikat Kinerja																			ST	ST				T	R	DP3APP&KB				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																			99.7%	92.3%				96.2%	29.9%	DP3APP&KB				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																			ST	ST				ST	SR	DP3APP&KB				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)																			65.0%	96.0%				63.3%	18.5%	DP3APP&KB				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER OPD)																			R	ST				R	SR	DP3APP&KB				

No	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD Perubahan pada Tahun 2021 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPK)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester 1		Semester 2		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=<	K	Rp	K	Rp			
												K	Rp	K	Rp												
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11=9+10		12= 11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16	

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Lhokseumawe**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan organisasi, tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Lhokseumawe. DP3AP2KB adalah unsur pendukung pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya, oleh karenanya kinerja pelayanan DP3AP2KB berkaitan dengan pencapaian kinerja terhadap pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan DP3AP2KB sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

2.3

**Tabel 2.2 (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Lhokseumawe**

NO	Indikator Kinerja SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>												
1	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan			20	20	20	40	40	20	20	20	40	
	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>												
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR			8	8	8	8	8	8	8	8	8	
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga			2	2	2	2	2	2,28	1.4	2	2	
5	Laju pertumbuhan penduduk			2	2	2	2	2	2,1	1,94	2	2	
6	Cakupan pelayanan reproduksi remaja			70	70	70	70	70	168	0	170	170	
7	Rasio Akseptor KB			81.45	81.62	81.78	81.94	82.11	65,9	77	81.78	81.94	
8	Cakupan peserta KB aktif			81.45	81.62	81.78	81.94	82.11	65,9	77	81.78	81.94	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Lhokseumawe**

Dalam rangka pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Rencana 2021 aparatur Dinas meliputi :

1. Kepala Dinas 1 Orang
2. Sekretaris Dinas 1 Orang
3. Kasubbag Sekretariat 3 Orang
4. Kepala Bidang 5 Orang
5. Kepala Seksi 10 Orang

Selain dari itu pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat dan aparatur secara riil, baik dilapangan maupun dikantor.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, isu-isu penting yang dihadapi DP3AP2KB dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yaitu masih kurangnya aparatur dari pada DP3AP2KB dari segi kualitas sumber daya manusia, terbatasnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, Masih kurangnya data terpilah dan informasi yang akurat tentang gender dan anak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

Adapun strategi DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam mengantisipasi persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam pembagunan dan perlindungan anak
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Melakukan upaya untuk penambahan jumlah tenaga PLKB melalui koordinasi dengan BKKBN.

4. Penyediaan data terpilah gender dan anak dengan mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).
5. Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi melalui media elektronik dan road show ke wilayah yang berdasarkan data dinyatakan rawan terjadi tindak kekerasan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK**

Review rancangan awal RKPK dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting. Perbandingan antara rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan dilakukan melalui seleksi program/kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas daerah. Review terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2023 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan SKPK Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rancangan awal RKPK yaitu :

1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi
2. Adanya Visi dan Misi Walikota Lhokseumawe
3. Dan mempertimbangkan kebutuhan yang ada



**Tabel 2.4 (T-C.31)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

**Nama SKPD : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe**

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA LHOKEUMAWE					7,351,942,182	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA LHOKEUMAWE					8,066,407,182	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7,351,942,182	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8,066,407,182	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					4,059,704,997	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					4,707,407,182	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,270,948,997</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,855,640,000</b>			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>16,400,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>20,000,000</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	16,400,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	20,000,000			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2,310,498,997</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2,600,000,000</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	408 OB	2,310,498,997	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	408 OB	2,600,000,000			

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>5,000,000</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	7 Dokumen	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	7 Dokumen	5,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Penyediaan Administrasi Umum OPD</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>128,250,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Penyediaan Administrasi Umum OPD</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>251,140,000</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24,150,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	6,300,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12,600,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	65,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1,140,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 Laporan	84,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 Laporan	150,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	<b>5 Unit</b>	<b>100,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	<b>5 Unit</b>	<b>139,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	139,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>454,300,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>437,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1,300,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	3 Laporan	74,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	3 Laporan	80,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	3 Laporan	50,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	3 Laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	329,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	350,000,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>251,500,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>403,500,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	56,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	160,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	10,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Lhokseumawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	59.39%	80,000,000	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	59.39%	85,000,000	
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender		10,000,000	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender		20,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kota Lhokseumawe	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan	18 OPD	10,000,000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kota Lhokseumawe	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan	18 OPD	20,000,000	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasvarakatan</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	1 Dokumen	40,000,000	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasvarakatan</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	1 Dokumen	45,000,000	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	40,000,000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	45,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Lembaga	<b>30,000,000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Lembaga	<b>20,000,000</b>	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Lembaga	30,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Lembaga	20,000,000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>75.00%</b>	<b>149,756,000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>75.00%</b>	<b>181,000,000</b>	
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Perlindungan Perempuan</b>	<b>80%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Perlindungan Perempuan</b>	<b>80%</b>	<b>45,200,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80%	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80%	45,200,000	
	<b>Penyelesaian Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Layanan Rujukan Lanjutan</b>	<b>80%</b>	<b>99,756,000</b>	<b>Penyelesaian Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Layanan Rujukan Lanjutan</b>	<b>80%</b>	<b>105,000,000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80%	99,756,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80%	105,000,000	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</b>	<b>80%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan</b>	<b>80%</b>	<b>30,800,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	80%	15,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	80%	30,800,000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Pembinaan kelompok perempuan</b>	<b>91.67%</b>	<b>430,000,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Pembinaan kelompok perempuan</b>	<b>91.67%</b>	<b>55,000,000</b>	
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Pembinaan kelompok perempuan</b>		<b>430,000,000</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Pembinaan kelompok perempuan</b>		<b>55,000,000</b>	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		430,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		55,000,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA</b>	<b>29.41%</b>	<b>19,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA</b>	<b>29.41%</b>	<b>20,000,000</b>	



No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>1 Dokumen</b>	<b>19,000,000</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>1 Dokumen</b>	<b>20,000,000</b>	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>33.46%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>33.46%</b>	<b>215,967,182</b>	
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Cakupan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>33.46%</b>	<b>40,000,000</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Cakupan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>33.46%</b>	<b>85,967,182</b>	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	30,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	65,967,182	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	20,000,000	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Jumlah Anak yang Mendapat Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota</b>		<b>70,000,000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Jumlah Anak yang Mendapat Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota</b>		<b>130,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	74000 Anak	20,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	74000 Anak	50,000,000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80,000,000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS HAK</b>									294,800,000	
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe			90,000,000	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe			82,800,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Perangkat daerah yang Mendapat advokasi kebijakan dan Pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	10OPD	15,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe			15,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe			67,800,000	
	<b>Penyediaan layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih</b>	<b>100 Persen</b>	<b>165,000,000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih</b>	<b>100 Persen</b>	<b>165,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewangan Kab/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Jenis	165,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewangan Kab/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	165,000,000	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		<b>46,000,000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		<b>47,000,000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	46,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	47,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>3,292,237,185</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>3,359,000,000</b>	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan</b>	<b>55.88%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan</b>	<b>55.88%</b>	<b>100,000,000</b>	
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		<b>50,000,000</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		<b>100,000,000</b>	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15,000,000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50,000,000	
	Penguatan kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	2 Dokumen	35,000,000	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	2 Dokumen	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana</b>	<b>52.28%</b>	<b>2,517,323,685</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Kota Lhokseumawe</b>	<b>Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana</b>	<b>52.28%</b>	<b>2,374,000,000</b>	
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana</b>		<b>407,567,850</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana</b>		<b>358,000,000</b>	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Lhokseumawe	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	3 Mitra Kerja	137,567,850	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Lhokseumawe	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	7 Organisasi	20,000,000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	3 Dokumen	150,000,000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	5 Dokumen	156,000,000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Dokumen	120,000,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	182,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		<b>100,000,000</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		<b>331,000,000</b>	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	253 Kader	100,000,000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	272 Orang	331,000,000	
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan		<b>1,959,755,835</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan		<b>1,598,000,000</b>	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Laporan	17,938,235	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Laporan	20,000,000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1446 Orang	100,000,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1446 Orang	178,000,000	



No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	1,841,817,600	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<b>Kota Lhokseumawe</b>	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	1,400,000,000	
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		<b>50,000,000</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		<b>87,000,000</b>	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	5 Kampung K	50,000,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	10 Kampung	87,000,000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>97.43%</b>	<b>724,913,500</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Kota Lhokseumawe	<b>Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>97.43%</b>	<b>885,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk		<b>724,913,500</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk		<b>885,000,000</b>	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	44,730,000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	45,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	204 Orang	680,183,500	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Lhokseumawe	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	204 Orang	840,000,000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat**

Perencanaan merupakan proses dimana manajemen merumuskan suatu tujuan cara untuk dapat mencapai, proses perencanaan terjadi disemua tipe. Jadi perencanaan adalah adalah pemilihan sekumpulan kegiatan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Adapun perencanaan merupakan proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut ditetapkan bahkan disahkan dan rencana harus diimplementasikan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kota. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislative dapat dilihat pada tabel 2.5

**Tabel 2.5 (T-C.32)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

Nama SKPD: Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>				

Catatan :

Program/Kegiatan merupakan hasil Musrenbang dan Reses Anggota Legislatif.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dari perangkat daerah sesuai yang ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu **1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dengan Indikator Tujuan adalah **Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik**. 2) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan Indikator Tujuan **Usia Harapan Hidup**.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB**

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu **1) Meningkatnya Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran adalah **Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik**, **2) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan indikator sasaran adalah **Usia Harapan Hidup**.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe mengacu pada target yang telah ditetapkan pada RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERENGGAT DAERAH**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2023</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<b>1</b>	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM yang Baik	Kategori/Poin	A 88.31
<b>2</b>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71.66



### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPK dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja oleh SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal, atau semua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

DP3AP2KB Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Lhokseumawe dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi
2. RPJMK dan RKPK Kota Lhokseumawe

Dalam upaya mengsucceskan pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Lhokseumawe Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah disusun sesuai program dan kegiatan.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe mempunyai program sebagaimana terlihat pada lampiran tabel 3.3.



2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	150,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	DP3AP2KB	25 Laporan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit		0 Unit	5 Unit	139,000,000					5 Unit	60,000,000	
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	139,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	5 Unit	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	437,000,000					12 Bulan	139,500,000	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30 Laporan	2,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	DP3AP2KB	30 Laporan	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	80,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	DP3AP2KB	3 Laporan	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	DP3AP2KB	2 Laporan	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5 Laporan	350,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	DP3AP2KB	5 Laporan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	403,500,000					12 Bulan	339,500,000	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	33,500,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Unit	33,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya			4 Unit	80,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	4 Unit	85,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	160,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Unit	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8 Unit	80,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	8 Unit	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	50,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	8 Unit	51,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN</b>	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	60.68 Persen	0 Persen	59.39 Persen	<b>85,000,000</b>				59.39 Persen	<b>80,000,000</b>	
2	08	02	2.01		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	75.30 Persen	0 Persen	75.3 Persen	<b>20,000,000</b>				75.3 Persen	<b>30,000,000</b>	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Perangkat Daerah	20,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	OPD Terkait	18 Perangkat Daerah	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	<b>45,000,000</b>				1 Dokumen	<b>25,000,000</b>	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	<b>20,000,000</b>				1 Lembaga	<b>25,000,000</b>	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang 20 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Perempuan dalam Partai Politik	0 Orang 20 Orang	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	100.00 Persen	0 Persen	75.00 Persen	<b>181,000,000</b>				75.00 Persen	<b>191,200,000</b>	
2	08	03	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah</b>	Cakupan Perlindungan Perempuan	100 Persen	0 Persen	80 Persen	<b>45,200,000</b>				80 Persen	<b>45,200,000</b>	

2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			45,200,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perempuan Korban Kekerasan	1 Dokumen	45,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.02		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan	100 Persen	0 Persen	80 Persen	<b>105,000,000</b>						80 Persen	<b>106,000,000</b>	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan			105,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perempuan Korban Kekerasan	30 Layanan	106,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah</b>	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	100 Persen	0 Persen	80 Persen	<b>30,800,000</b>						80 Persen	<b>40,000,000</b>	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	20 Orang			30,800,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Lhokseumawe	20 Orang	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan	94.12 Persen	0 Persen	91.67 Perse	<b>55,000,000</b>						91.67 Perse	<b>80,000,000</b>	
2	08	04	2.01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah</b>	Persentase Pembinaan kelompok perempuan	94.12 Persen	0 Persen	91.67 Perse	<b>55,000,000</b>						91.67 Perse	<b>80,000,000</b>	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			55,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kelompok Perempuan yang dibina	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	35.29 Persen	0 Persen	29.41 Perse	<b>20,000,000</b>						29.41 Perse	<b>25,000,000</b>	
2	08	05	2.01		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	<b>20,000,000</b>						1 Dokumen	<b>25,000,000</b>	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			20,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	43.38 Persen	n	0 Persen	33.46 Perse	<b>215,967,182</b>					33.46 Perse	n	<b>525,000,000</b>			
2	08	06	2.01		<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan</b>	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	43.38 Persen	n	0 Persen	33.46 Perse	<b>85,967,182</b>					33.46 Perse	n	<b>375,000,000</b>			
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Non				7 Organisasi	65,967,182	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Anak Kota Lhokseumawe	7 Organisasi	si	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Anak Kota Lhokseumawe	8 Dokumen	n	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	06	2.02		<b>Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	600.000 Anak		0 Anak	74000 Ana	<b>130,000,000</b>							74000 Ana	k	<b>150,000,000</b>	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				74000 Oran	50,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Anak Kota Lhokseumawe	74000 Ora	ng	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Anak Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	n	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>294,800,000</b>							100 Persen		<b>304,000,000</b>	
2	08	07	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>82,800,000</b>							100 Persen		<b>88,000,000</b>	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Perangk Daerah	15,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Anak Korban Kekerasan	10 Perangk Daerah	at	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	67,800,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Anak Korban Kekerasan	1 Dokumen	n	68,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

2	08	07	2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Pengaduan	0 Pengaduan	65 Pengaduan	<b>165,000,000</b>						65 Pengaduan	<b>166,000,000</b>		
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Layanan	165,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Anak Korban Kekerasan	40 Layanan	166,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	<b>47,000,000</b>						5 Dokumen	<b>50,000,000</b>		
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	47,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Anak Korban Kekerasan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>3,359,000,000</b>							<b>3,475,000,000</b>		
2	14	02		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung	73.53 Persen	0 Persen	55.88 Perse	100,000,000						55.88 Perse	<b>120,000,000</b>		
2	14	02	2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	<b>100,000,000</b>						2 Dokumen	<b>120,000,000</b>		
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			2 Dokumen	50,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Mitra Kerja	2 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			2 Dokumen	50,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Mitra Kerja	2 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	50.66 Persen	0 Persen	52.28 Perse	<b>2,374,000,000</b>						52.28 Perse	<b>2,455,000,000</b>		



2	14	03	2.01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	50.66 Persen	0 Persen	52.28 Perse	<b>358,000,000</b>						52.28 Perse	<b>375,000,000</b>	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			7 Organisasi	20,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Masyarakat	7 Organisasi	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			5 Dokumen	156,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Masyarakat	5 Dokumen	160,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			4 Laporan	182,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Masyarakat	4 Laporan	185,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	253 Kader	0 Kader	253 Kader	<b>331,000,000</b>						253 Kader	<b>335,000,000</b>	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			272 Orang	331,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Masyarakat	272 Orang	335,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Paskes	0 Paskes	19 Paskes	<b>1,598,000,000</b>						19 Paskes	<b>1,655,000,000</b>	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			19 Laporan	20,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	19 Laporan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1446 Orang	178,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	1446 Orang	180,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			1 Unit	1,400,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	1 Unit	1,450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2	14	03	2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan</b>	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	5 Kampung KB		0 Kampung KB	5 Kampung KB	<b>87,000,000</b>					5 Kampung KB	<b>90,000,000</b>		
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			10 Kampung	87,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Balai Penyuluh KB, Kader dan Kampung KB	10 Kampun	g 90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	119.49 Pers	en	0 Persen	97.43 Persen	<b>885,000,000</b>				97.43 Perse	n <b>900,000,000</b>		
2	14	04	2.01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	64 Kelompok		0 Kelompok	55 Kelompok	<b>885,000,000</b>				55 Kelomp	ok <b>900,000,000</b>		
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1 Laporan	45,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Kelompok Ketahanan Keluarga	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			204 Orang	840,000,000	Kota Lhokseumawe Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan	Kelompok Ketahanan Keluarga	204 Orang	850,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>TOTAL</b>										<b>8,476,138,182</b>						<b>8,367,400,000</b>		

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan dan capaian kinerja yang telah direncanakan baik dalam RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023. Pada Tahun 2023 Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah**

##### **Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

##### **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPK

##### **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

##### **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya.

**2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota**

- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kab / Kota**

- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

**Kegiatan Penguatan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab / Kota**

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

**3. Program Perlindungan Perempuan**

**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan lingkup Daerah Kab / Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota

**Kegiatan Penyediaan Layanan rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota.**

- Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota.**

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota

**4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

**Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab / Kota**

- Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab / Kota

**5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kota Lhokseumawe**

- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota

**6. Program Pemenuhan Hak Anak**

**Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab / Kota**

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
- Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota

**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab / Kota**

- Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota

**7. Program Perlindungan Khusus Anak**

**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah**

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program Dana Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kota Lhokseumawe.
- Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota

**Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khususnya Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah**

- Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus Kota Lhokseumawe

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota.

- Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota

#### **8. Program Pengendalian Penduduk**

**Kegiatan Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk**

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota.
- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

#### **9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**

- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal
- Pengelolaan Operasional dan Sarana dibalai Penyuluhan KKBPK

**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab / Kota**

- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Penyediaan Sarana dan Penunjang Pelayanan KB

**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber KB.**

- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

**10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahter (KS)**

**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

Adapun rincian dari Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.3 pada Bab III.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Renja ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023. Guna menjamin terlaksananya program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang kerja di lingkungan Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan Renja Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe Tahun 2022 bila diperlukan.
4. Renja Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Renja Dinas PP, PA, Dalduk dan KB Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.